

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Hukum tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press
- Carter, Megan and Bouris, Andrew, 2006, *Freedom of Information Balancing the Public Interest*, London: The Constitution Unit
- Cook, Meredith, 2003, *Balancing the Public Interest: Applying the public interest test to the exemption in the UK Freedom of Information Act 2000*, London: The Constitution Unit
- Daim, Nuryanto A., 2014, *Hukum Administrasi Perbandingan Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Surabaya: Penerbit Laksbang Justitia
- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group
- Fahmal, H.A. Muin, 2008, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Katzen, Hayley, Douglas, Roger, 1999, *Administrative Law*, Perth: Butterworths
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media
- Mihradi, R. Muhammad, 2011, *Kebebasan Informasi Publik Versus Rahasia Negara*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia
- Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Pudyatmoko, Y. Sri dan Tjandra, W. Riawan, 1996, *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Ridwan, 2009, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, Yogyakarta: FH UII Press
- Sedarmayanti, 2004, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Membangun Sistem Manajemen Kerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung: Mandar Maju
- Setiawan, Rachmat, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sumardjono, Maria S.W., 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
- Supandi, 2016, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Alumni
- Sutedi, Adrian, 2008, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Jakarta: Sinar Grafika
- Tim Penyusun Komisi Informasi Pusat bekerja sama dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) dan Yayasan Tifa, 2009, *"Anotasi Undang-*



- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*”, Jakarta: Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia
- Thohari, A. Ahsin, 2016, *Hak Konstitusional Dalam Hukum tata Usaha Negara*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Wibowo, Richo Andi, Simamora, Yohanes Sogar, Anisah, Siti, Putri, Karina Dwi Nugrahati, Kurniawan, Faizal, Haryati, Dwi, Amalia, Rizky, Azzuhri, Abdul Adhim, Perdana, Reghi, Setiawan, Arib, Doloksaribu, Selviana Tiurma, Suparjo, Nopitasari, Aisyah, Sedyani, Nugraha, Xavier, 2021, *Kontrak Pemerintah: Konsep, Ragam, Perkembangan Regulasi, dan Kajian Putusan*, Jakarta: Kencana
- Witanto, D.Y., 2012, *Dimensi Kerugian Negara Dalam Hubungan Kontraktual (Suatu Tinjauan Terhadap Risiko Kontrak Dalam Proyek Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah)*, Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Zulkarnain, Sirajuddin, Widiarto, Aan Eko, 2006, *Menggagas Keterbukaan Informasi Publik Upaya Kolektif Berantas Korupsi*, Malang: Yappika
- Marbun, S.F., 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Yogyakarta: UII Press

## **B. Peraturan perundang-undangan**

UUD 1945

TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers

UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif

Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik



- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 3 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
- Peraturan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 9 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- Keputusan Menko Perekonomian No. 273 Tahun 2020 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Kemenko Perekonomian
- Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 2006-2007, Masa Persidangan III, 15 Januari 2007
- Risalah Rapat Rancangan Undang-Undang Tentang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik 2006-2007, Masa Persidangan II, 20 November 2006
- Universal Declaration of Human Rights*
- International Covenant on Civil and Political Rights*
- UK Freedom of Information Act 2000, <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/36/part/I> (akses 28 Oktober 2021)
- Freedom of Information Act 1982 (the Commonwealth Act) <https://www.legislation.gov.au/Details/C2019C00055> (akses 28 Oktober 2021)

### **C. Putusan**

- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 001/VII/KIP-PS-A/2010
- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 120/VI/KIP-PS-M-A/2011
- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 298/VII/KIP-PS-M-A/2011
- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 361/X/KIP/PS-M-A/2011
- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 391/XII/KIP-PS-M-A/2011
- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 012/II/KIP-PS-A/2013
- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 040/IV/KIP-PS-A/2013
- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 1369/XII/KIP-PS-M-A-2014
- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 056/XI/KIP-PS-A/2015
- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015
- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 015/VI/KIP-PS-A/2018
- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 005/I/KIP-PS-A/2019
- Putusan Komisi Informasi Pusat No. 013/VI/KIP-PS-A/2020
- Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten No. 017/III/KI Banten-PS/2020
- Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten No. 034/IV/KI Banten-PS/2020



Putusan Komisi Informasi Provinsi DIY No. 006/IX/KIDDIY-PS/2018  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 102/G/2012/PTUN-JKT  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 123/G/2015/PTUN-JKT  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 2/G/KI/2017/PTUN.JKT  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 221/G/KI/2018/PTUN-JKT  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 233/G/KI/2020/PTUN.JKT  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No. 30/G/2012/PTUN-SRG  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No. 52/G/KI/2019/PTUN-SMG  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 39/G/KI/2020/PTUN.SBY

#### **D. Karya Ilmiah**

- Kholifah, Ayu, “Analisis Penentuan Status Badan Publik bagi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Putusan Komis Informasi Pusat No. 011/III/KIP-PS/2016)”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018
- Kusumaningrum Dewi Eliza, “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pencari Keadilan”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015
- Siregar, Tongku, “Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Melalui Jalur Mediasi Oleh Mediator Komisi Informasi Publik Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Tesis*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018
- Hastuti, Yeni Septi, “Tinjauan Terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung RI No. 1022K/Pdt/2006, Tanggal 13 Desember 2006), *Skripsi*, Fakultas Hukum Program Kekhususan I Huku Tentang Hubungan Antara Sesama Anggota Masyarakat, Universitas Indonesia, 2011
- Muslimah, Endang, “Implementasi Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi Yang Dikecualikan Berdasarkan Perkembangan Putusan Komisi Informasi Pusat Dan Putusan Pengadilan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2019

#### **E. Jurnal dan Publikasi Ilmiah**

- Adha, Lalu Hadi, “Kontrak BOT Sebagai Perjanjian Kebijakan (Beleidovereenkomst)”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2009
- Fatoni, Arif Widi, “Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik Melalui Ajudikasi dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 4, No. 1, April 2019
- Putra, Jebby Mandala, Santoso, Budi, Prabandari, Aditya Paramitha, “Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Menjaga Rahasia Dagang Pada Perjanjian Waralaba Merek “Thai Tea” di Kota Semarang”, *Notarius*, Vol. 14, No. 1, 2021
- Ramli, Ahmad M., Dewi, Sinta, Rafianti, Laina, Ramli, Tasya Safiranita, Putri, Sherly Ayuna, dan Lestari, Maudy Andreana, “Perlindungan Rahasia Dagang

- dalam Industri Jasa Telekomunikasi”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 15, No. 2, Juli 2021
- Rifai, Akhmad, “Kemerdekaan Informasi: Catatan atas Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, *Jurnal Dakwah*, Vol. IX, No. 2, Juli-Desember 2008
- Rismawaty, Asry, “Non Disclosure Agreement sebagai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Perjanjian Kerjasama”, *Aktualita*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019
- Salam, Syukrom, “Gugatan Tersangka Terhadap BPKP: Gugatan Yang Salah Alamat dan Salah Kamar”, *Dictum*, Vol. 13, April 2019
- Sari, Indah, “Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11, No. 1, September 2020
- Semaun, Syahriah, “Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang”, *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2011
- Wibawa, Kadek Cahya Susila, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 2, Juni 2019
- Abdullah, Ujang, “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Keterbukaan Informasi Publik”, *Laporan Penelitian*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2014
- Susilo, Agus Broto dan Tim, “Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi (AE) tentang Rahasia Dagang (UU No. 30 Tahun 2000)”, *Laporan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010
- Harianto, Aries, “Kebatalan Perjanjian Yang Bertentangan Dengan Kesusilaan”, *Proceeding Konferensi Nasional Hukum Perdata III*, Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya & Intrans Publishing, Malang, 2017

#### **F. Artikel atau Publikasi dari Internet**

- Adam, Aulia, “Kartu Prakerja: Keganjilan Seleksi Platform Digital Bermodal Asing”, *tirto.id*, <https://tirto.id/kartu-prakerja-keganjilan-seleksi-platform-digital-bermodal-asing-eQbX> (akses 8 Maret 2021)
- Al’Afghani, Mohamad Mova, “Perjanjian Badan Publik Dengan Pihak Ketiga: Anotasi Pasal 11 ayat (1) e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008”, Makalah, Academai, [https://www.academia.edu/2035467/Perjanjian\\_Badan\\_Publik\\_Dengan\\_Pihak\\_Ketiga\\_Anotasi\\_Pasal\\_11\\_ayat\\_1\\_e\\_Undang\\_Undang\\_Nomor\\_14\\_Tahun\\_2008](https://www.academia.edu/2035467/Perjanjian_Badan_Publik_Dengan_Pihak_Ketiga_Anotasi_Pasal_11_ayat_1_e_Undang_Undang_Nomor_14_Tahun_2008) (akses 13 Agustus 2021)
- Erawati, Elly, Budiono, Herlien, 2010, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Jakarta: National Legal Reform Program, hlm. 17, [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/download\\_file/11e9b3892cfdcdca8ab85313834383535/pdf/11e9b3892cfdcaf68b7b313834383535.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/restatement/download_file/11e9b3892cfdcdca8ab85313834383535/pdf/11e9b3892cfdcaf68b7b313834383535.html) (akses 19 Oktober 2021)
- Farisa, Fitri Chusna, “Pemerintah Akui Diskusi dengan 8 Platform Digital Mitra Kartu Prakerja Sebelum Teken MoU”, *Kompas.com*,



- <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/21/15335751/pemerintah-akui-diskusi-dengan-8-platform-digital-mitra-kartu-prakerja> (akses 13 Maret 2021)
- Nofian, Anggio, “Pemerintah: Tak Ada Penunjukan Platform Digital Pada Program Kartu Prakerja”, *goodmoney.id*, <https://goodmoney.id/pemerintah-tak-ada-penunjukkan-platform-digital-pada-program-kartu-prakerja/> (akses 15 Maret 2021)
- Primayogha, Egi, Easter, Lalola, Juliantari, Siti, Zabar, Tibiko, Alamsyah, Wana, “Polemik Mitra Dan Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja: Catatan Kritis Lembaga Pelatihan Program Program Kartu Prakerja”, *Indonesia Corruption Watch*, [https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Kajian\\_Prakerja\\_Vol\\_2\\_Catatan\\_Kritis\\_Lembaga\\_Pelatihan\\_compressed.pdf](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Kajian_Prakerja_Vol_2_Catatan_Kritis_Lembaga_Pelatihan_compressed.pdf) (akses 12 Maret 2021)
- Pusdatin, “Open Government Indonesia”, *Kementerian Perhubungan Republik Indonesia*, <http://dephub.go.id/post/read/open-government-indonesia-ogi-13385> (akses 9 April 2021)
- Septianto, Bayu, “Belva, Stafsus Millennial Jokowi, Mengundurkan Diri”, *tirto.id*, <https://tirto.id/belva-stafsus-milenial-jokowi-mengundurkan-diri-ePZh> (akses 12 Maret 2021)
- Sulistyowati, Endang & Febriyanta, I Made Murdwarsa, “Keterbukaan Informasi Publik Pada Era Keterbukaan Informasi”, *Kementerian Keuangan RI*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13275/Keterbukaan-Informasi-Publik-Pada-Era-Keterbukaan-Informasi.html#:~:text=Keterbukaan%20informasi%20publik%20bertujuan%20menjamin,faktor%20pendorong%20dalam%20menciptakan%20dan> (akses 2 April 2021)
- “Amanat Nawa Cita: Penuhi Hak Untuk Tahu, Keterbukaan Informasi Publik Menjamin Kualitas Hidup yang Lebih Baik”, *Kementerian Komunikasi dan Informatika RI*, [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/8076/keterbukaan-informasi-publik-menjamin-kualitas-hidup-yang-lebih-baik/0/artikel\\_gpr](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/8076/keterbukaan-informasi-publik-menjamin-kualitas-hidup-yang-lebih-baik/0/artikel_gpr) (akses 2 April 2021)
- “Catatan Akhir Tahun Pemberantasan Korupsi Tahun 2020: Pandemi, Kemunduran Demokrasi dan Redupnya Spirit Pemberantasan Korupsi”, *Indonesia Corruption Watch* <https://www.antikorupsi.org/id/article/catatan-akhir-tahun-pemberantasan-korupsi-tahun-2020-pandemi-kemunduran-demokrasi-dan> (akses 12 April 2020)
- “KPK Selidiki Kasus Prakerja, Beranikah Periksa Lingkaran Istana?”, *Harian Merah Putih*, <https://harianmerahputih.id/baca-1392-kpk-selidiki-kasus-prakerja-beranikah-periksa-lingkaran-istana> (akses 12 Maret 2021)
- “Menko Airlangga Terima 11 Perwakilan Penerima Kartu Prakerja dari Seluruh Indonesia”, *Siaran Pers No. HM.4.6/220/SET.M.Ekon.3/12/2020*, *Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*, Jakarta, 15 Desember 2020, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/724/menko-airlangga-terima-11->

- [perwakilan-penerima-kartu-prakerja-dari-seluruh-indonesia](#) (akses 14 Maret 2021)
- “Pemerintah Luncurkan Situs Resmi Kartu Prakerja Untuk Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja Muda”, *Siaran Pers Bersama No. HM.4.6/35/SET.M.EKON.2.3/03/2020*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, 20 Maret 2020, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/192/pemerintah-luncurkan-situs-resmi-kartu-prakerja-untuk-tingkatkan-daya-saing-tenaga-kerja-muda> (akses 27 Februari 2021)
- “Pemerintah Resmi Buka Pendaftaran Kartu Prakerja Tahap Pertama”, *Siaran Pers No. HM.4.6/45/SET.M.EKON.2.3/04/2020*, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Jakarta, 11 April 2020, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/226/pemerintah-resmi-buka-pendaftaran-kartu-prakerja-tahap-pertama> (akses 14 Maret 2021)
- “Pengantar Pengadaan Barang/Jasa di Indonesia: Pelatihan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah Tingkat Dasar/Pertama”, Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah, *Modul*, 2010, <https://ulp.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/10/modul1-pengantar-pengadaan-barang-jasa-di-indonesia-120722022447-phpapp01.pdf> (akses 21 Januari 2022)
- “Simak Langkah-langkah menjadi Lembaga Pelatihan Program Kartu Prakerja ini!”, *Kartu Prakerja*, <https://www.prakerja.go.id/artikel/simak-langkah-langkah-bermitra-dengan-prakerja-ini> (akses 17 Juli 2021)
- “What is freedom of information?”, Australian Government, *Office the Australian Information Commisioner*, <https://www.oaic.gov.au/freedom-of-information/your-foi-rights/what-is-freedom-of-information/> (akses 18 April 2021)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/pribadi> (akses 16 September 2021)